



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAHRUDIN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 15602

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.260.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 259 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 13.950 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, WARISAN Rp. 498.000.000
3. Tanah Seluas 7.070 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, WARISAN Rp. 353.500.000
4. Tanah Seluas 1.007 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, WARISAN Rp. 213.000.000
5. Tanah Seluas 4.578 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, WARISAN Rp. 981.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1.358 m2/400 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, WARISAN Rp. 1.540.000.000
7. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
9. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **634.000.000**

1. MOBIL, MAZDA 2 SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000



2. MOTOR, YAMAHA BYSON SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 A/T (GUNI65R-SDTHXD)/ JEEP Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 515.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	227.909.834
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.122.409.834
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.122.409.834

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.